

Judul : Puan: DPR menampung aspirasi pengunjuk rasa
Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

Puan: DPR Menampung Aspirasi Pengunjuk Rasa

Penolakan terhadap keberadaan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR disampaikan peserta unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR menyatakan menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan.

JAKARTA, KOMPAS — Massa dari berbagai elemen masyarakat, Senin (25/8/2025), berunjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka, antara lain, memprotes rencana penambahan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan menghormati dan menyerap semua aspirasi yang disampaikan.

"Kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari seluruh masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara," ucap Puan, politisi PDI Perjuangan ini, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Daseo Ahmad. "Kita akan terima dengan baik, kita akan lakukan introspeksi-introspeksi ke dalam. Namun, kami imbau kepada masyarakat atau adik-adik yang menyampaikan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku," katanya.

Menolak tunjangan

Pantauan *Kompas*, massa peserta unjuk rasa sudah berkumpul di sekitar Kompleks Parlemen sejak sekitar pukul 0900 WIB. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat dan Revolusi Rakyat Indonesia. Mereka bersama-sama, antara lain, menolak tunjangan perumahan anggota DPR.

Menurut perhitungan Forum Indonesia untuk Transpa-

>> BACA JUGA:

Mengapa 'Tunjangan Perumahan Anggota DPR' Jadi Polemik?

Di tengah polemik tunjangan rumah puluhan juta rupiah anggota DPR hingga penghasilan mereka ratusan juta rupiah, rakyat masih dilanda kesulitan hidup. **KOMPASID**

kompas.id/polemik

ransi Anggaran (Fitra) dengan mengolah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023-2025, penghasilan satu anggota DPR ditaksir Rp 230 juta per bulan yang terdiri dari gaji dan tunjangan. Itu belum termasuk tunjangan perumahan

an Rp 50 juta yang tengah diusulkan saat ini.

Jika ditotal, penghasilan satu anggota DPR mencapai Rp 2,8 miliar per tahun. Untuk itu, negara harus mengalokasikan anggaran Rp 1,6 triliun selama 2025 untuk membayar 580 anggota DPR.

Iwenk, warga Bekasi, Jawa Barat, yang ikut terlibat dalam unjuk rasa mengaku kecewa terhadap anggota DPR. Ia merasakan ketidakadilan, terutama terkait penghasilan anggota DPR yang mencapai ratusan juta rupiah di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Peserta aksi lainnya, Maulana Hasanuddin, juga mengaku kecewa terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak optimal. Alih-alih memperbaiki kinerja, penghasilan anggota DPR justru bertambah lewat tunjangan perumahan anggota DPR. Jum-

lah itu pun dinilai bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk efisiensi anggaran.

Hal senada disampaikan Rizal, seorang mahasiswa yang tiba di sekitar Kompleks Parlemen sekitar pukul 1100. Dia mengaku mengikuti unjuk rasa atas inisiatif sendiri.

Dibubarkan

Unjuk rasa yang semula berjalan damai itu kemudian berubah riuh sekitar pukul 1300 WIB. Aparat membubarkan massa dengan menembakkan air dari *water cannon* dan melepaskan gas air mata. Sejumlah pengunjuk rasa sempat mencoba bertahan dan melawan dengan melempar botol air plastik. Namun, lambat laun upaya itu kandas. Massa pun bertarian

(Bersambung ke him 15 kol 1-4)

Puan: DPR Menampung Aspirasi Pengunjuk Rasa

(Sambungan dari halaman 1)

ke arah Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, hingga menyeberangi Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.

Sekitar pukul 14.00, massa bergeser menuju gerbang belakang Gedung DPR.

Hingga menjelang pukul 18.00, massa mulai membubarkan diri saat hujan turun. Lalu lintas kendaraan yang semula tersendat mulai kembali lancar.

Tidak dilarang

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aksi unjuk rasa tidak akan dilarang karena merupakan hak konstitusional warga negara. Masyarakat berhak menyuarakan aspirasinya sepanjang dilakukan dengan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Silakan saja (sampaikan) aspirasi. Namanya negara demokrasi boleh saja menyuarakan

kehendak dan keinginannya sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum, hukum, dan lain-lain," ujar Yusril.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, juga mengatakan, masyarakat berhak berunjuk rasa karena keberatan dengan penghasilan anggota DPR. Unjuk rasa adalah cara masyarakat menyampaikan aspirasi.

Terkait jumlah penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis, Aria Bima meminta agar publik tak hanya memperhitungkan pemasukannya, tetapi juga pengeluarannya per bulan. Tanpa menyebut angka, ia mengatakan pendapatannya sebagai anggota DPR dialokasikan untuk banyak hal, termasuk keperluan daerah pemilihan.

"Tanya saja ke Bale Rakyat Aria Bima. Pengeluarannya untuk mengurus konstituen. Untuk ambulans berapa? Untuk mobil tangki air berapa? Sanggar tarinya berapa?" tutur Aria Bima.

Anggota DPR dari Fraksi

Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo atau dikenal dengan Pasha Ungu, pun mengatakan seluruh pendapatan yang diterima anggota Dewan telah melalui mekanisme perhitungan yang matang dan mempertimbangkan berbagai faktor.

Menurut dia, biaya hidup dan transportasi bagi anggota DPR yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, seperti Papua, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara, memerlukan pendanaan lebih besar. Komponen tunjangan yang diberikan sepenuhnya bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas para wakil rakyat.

"Artinya begini, semua sudah dihitung secara baik, kira-kira begitu, sehingga semua yang jadi kebutuhan akses, kebutuhan-kebutuhan dukungan yang lain bagi anggota DPR untuk bekerja di DPR sudah terpenuhi," ujar Pasha.

Begitu pula disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB), Syamsu Ruzal. Meski demikian, setiap aspirasi masyarakat dijanjikan bakal direspons oleh DPR, termasuk soal tunjangan perumahan DPR yang diprotes publik. Hal yang sama sudah ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani.

Terkait nominal tunjangan perumahan Rp 50 juta, menurut dia, hal itu sudah diputuskan oleh DPR pada periode 2019-2024. Oleh karena itu, anggota DPR yang menjabat saat ini tak terlibat dalam pembahasan nominal jumlah yang disepakati itu. Pembahasan itu juga kewenangan Kementerian Keuangan serta pimpinan DPR dan Sekjen DPR.

Namun, Syamsu tidak memperlmasalahkan jika nantinya ada kajian ulang terhadap nilai tunjangan perumahan anggota DPR tersebut. "Soal nilai dan besaran, pasti cukup, berapa pun nilainya, asal melalui pembicaraan rasional pasti akan disesuaikan," katanya.

(DYT/INA/DEA/NIA/VAN/
RAM/DAN/MKN)